



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



2024-2026



www.muaraenimkab.go.id



kominfo@muaraenimkab.go.id



muaraenim_lawanhoax
lapor_muaraenim
diskominfo_muaraenim



@pemerintah kabupaten muara enim



Diskominfo muara enim



Suara radio muara enim

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.14 Kel. Pasar 3 Muara Enim

Telp/Fax (0734) 421175

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 sebagai arah dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 3 tahun. Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (Tiga) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul dan yang mengandung visi, misi, nilai - nilai, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim yang program kegiatan diusulkan dalam rangka menunjang capaian program yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Di samping target kinerja sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah



disesuaikan dengan perhitungan capaian program dan kegiatan untuk menunjang ketercapaian tujuan RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan yang sangat mendukung terselesainya Renstra ini. Akhirnya kami harapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis ini dan kiranya dapat meningkatkan kinerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim khususnya untuk 3 (Tiga) tahun ke depan.

Muara Enim,

2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM**

Arifanardi
ARDIAN ARIFANARDI, .AP., .M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740720 199311 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	9
2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Dinas Kominfo	9
2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo dan Informatika	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	28
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	34
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA..	35
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan formatika.....	35
3.2 Isu-isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ..	46
4.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1 Sasaran dan Strategi	52
5.2 Arah Kebijakan	59
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
6.1 Rencana dan Program Kegiatan	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
7.1 Indikator Kinerja Utama	75
7.2 Indikator Kinerja Kunci	77
BAB VIII PENUTUP	78



DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 2.1 Sebaran PNS berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2 Sebaran PNS berdasarkan Eselon	19
Tabel 2.3 Sebaran PNS berdasarkan Umur	20
Tabel 2.4 Sebaran PNS berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 2.5 Daftar Sarana Prasarana	23
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	30
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	33
Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan 1	37
Tabel 3.2 Rumusan Permasalahan 2	38
Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	49
Tabel 5.1 Sasaran dan Strategi 1	55
Tabel 5.2 Sasaran dan Strategi 2	59
Tabel 5.3 Arah Kebijakan	60
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	67
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri no. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025, menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 3 tahun.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sebagai Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 30 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 31 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi inspektorat, satuan polisi pamong praja, dinas,

badan, kecamatan dan kelurahan, terakhir telah diubah lagi dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di era keterbukaan informasi. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Muara Enim melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi *e - government* secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan dengan mengacu pada Renstra dan perubahannya.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai *public relation* di daerahnya.

Untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Bidang Statistik tersebut, maka disusunlah suatu perencanaan strategis sebagai langkah awal aktualisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4723);



2. Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Permendagri nomor 86 tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
14. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2019) ;
16. Peraturan Bupati Muara Enm No. 20 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya bertujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk merealisasikan maksud tersebut dibutuhkan rambu-rambu agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya keterbatasan pembiayaan pemerintah atau dunia usaha mengharuskan adanya pilihan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim yang akan digunakan Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung nilai – nilai, faktor–faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Maksud disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian serta bidang Statistik, sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dan lingkungan yang cepat berubah.
- b. Sebagai Pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian serta bidang Statistik.

2. Tujuan

- a. Menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
- b. Pedoman bagi unit kerja untuk memberikan pelayanan prima kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).



- c. Alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja dengan implementasi renstra ini.
- d. Memberikan arah pembangunan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim selama 3 (Tiga) Tahun kedepan.
- e. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.
- f. Sebagai dasar penyusunan Renja/RKT dan RKA-ODP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kominfo

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo.
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo
- 4.2 Cascading Kinerja

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan



BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII. PENUTUP

BAB I **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur Organisasi inspektorat, satuan polisi pamong praja, Dinas, badan, kecamatan dan kelurahan, terakhir telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informatika di bagi dalam 4 bidang yakni :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Komunikasi dan Informatika serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik.
3. Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government.



4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik.
5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
3. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan urusan di di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan keuangan.
6. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tiap bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas.
 - b. Memverivikasi bahan, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas.



- c. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan administrasi kepegawaian.
 - e. Pengkoordinasian pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas.
 - f. Pengevaluasian bahan penyusunan laporan dan pelaksanaan program.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Fungsi Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik.
 - b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, pengendalian dan pengawasan informasi publik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten.
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral.
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten.
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten.
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.
3. Fungsi Bidang Penyelenggaraan e-Government



- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penyelenggaraan E-Government.
 - b. Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government.
 - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government.
 - d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di]bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government.
 - e. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan infrastruktur E-Government meliputi infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan tata kelola E-Government.
 - f. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government meliputi Infrastruktur TIK, Pengembangan Aplikasi, dan Tata Kelola E-Government.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Fungsi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Keamanan Informasi .
 - b. perumusan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi.
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi.
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi.



- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - g. pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi meliputi pengawasan dan evaluasi persandian, tata kelola persandian serta keamanan informasi.
5. Fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik.
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik.
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik.
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik; penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik.
 - e. pemantauan, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang pengelolaan komunikasi publik meliputi pengelolaan media komunikasi publik, kemitraan komunikasi publik, dan pengelolaan kelompok komunikasi publik.



3. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penggabungan dari Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Pengelolaan Data & Arsip dan Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, dua Dinas dan satu subdin tersebut di atas dilebur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016 merupakan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten dibidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian serta bidang Statistik menjadi Dinas komunikasi dan informatika.

Dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi mulai diterapkan sebagai tindaklanjut terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dalam ayat 1 pasal 350A dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan kedalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. Penyetaraan dimaksud ditetapkan dengan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan telah diterbitkannya peraturan daerah kabupaten muara enim nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah serta peraturan bupati Muara Enim Nomor 20 tahun 2022 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas komunikasi dan informatika dengan struktur organisasinya terdiri dari :

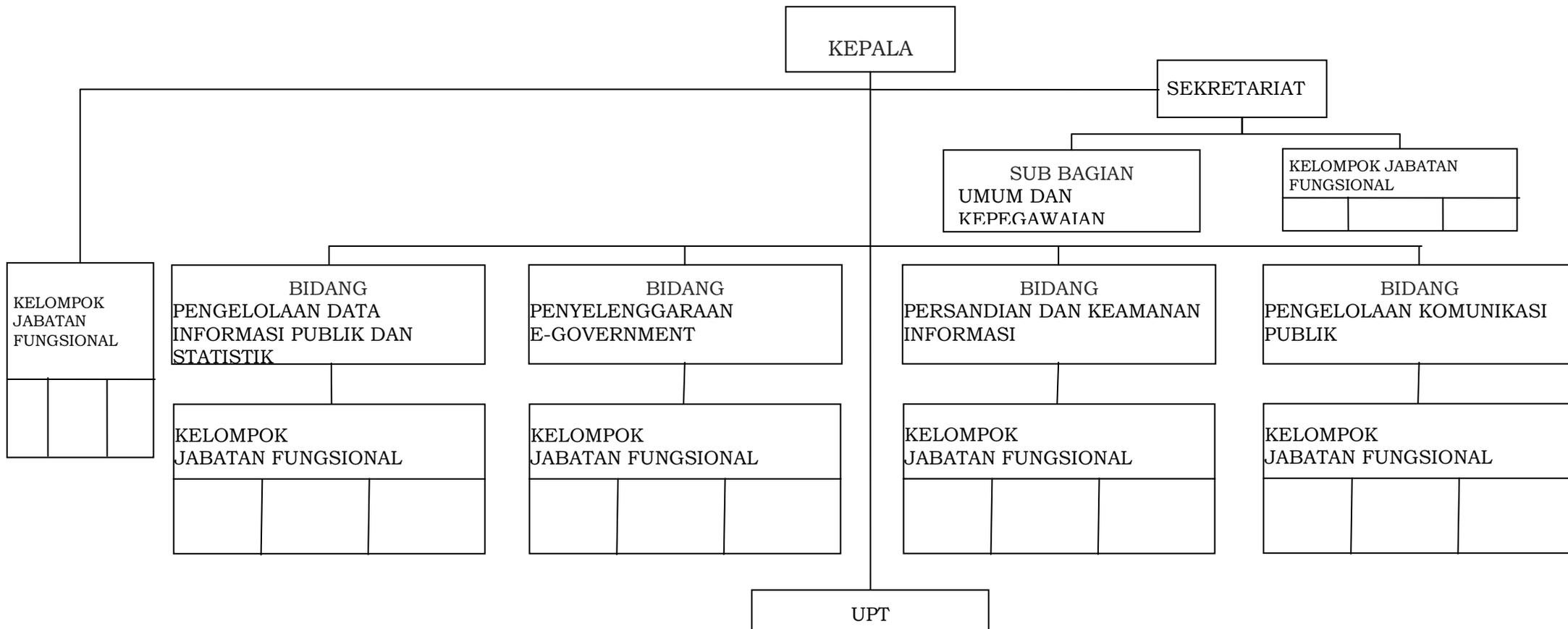
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Substansi Perencanaan



- Kelompok Substansi Keuangan
- 3. Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Opini Publik
 - Kelompok Substansi Layanan Informasi Publik
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik
- 4. Bidang Penyelenggaraan E-Government, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Kelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
 - Kelompok Substansi Seksi Tata Kelola E-Government
- 5. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi , membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi Persandian
 - Kelompok Substansi Tata Kelola Persandian
 - Kelompok Substansi Keamanan Informasi
- 6. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Kelompok Substansi Kemitraan Komunikasi Publik
 - Kelompok Substansi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAN INFORMATIKA



2.2 Sumber Daya Dinas komunikasi Dan Informatika

1. Sumber daya Manusia

Pada saat ini, arah kebijakan umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim diarahkan pada pembangunan informasi yang dibarengi dengan aplikasi teknologi yang sering diistilahkan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Fokus pembangunan informasi diarahkan pada diseminasi informasi terhadap publik melalui pemanfaatan lembaga komunikasi serta potensi budaya lokal, dan pembangunan IT diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang mendukung kinerja birokrasi. Keduanya sudah jelas untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk mewujudkan ide ini, maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur.

Pemanfaatan TIK yang ada tidak lepas dari kebutuhan Bidang Statistik dan Persandian. Pengamanan Informasi dalam sistem Persandian menjamin pelaksanaan e-Government. Hal ini mendukung keamanan dalam pembentukan Kota Cerdas (Smart City). Sementara itu kebutuhan akan data yang beragam dapat dikelola menjadi satu sumber atau satu pintu sehingga data yang dihasilkan menjadi satu data yang pada akhirnya pola koordinasi dan pengamanan dapat dilakukan dengan baik dan, penerima dan pemanfaat data dapat terintegrasi dan kepastian data yang digunakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti pada Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana. Berikut ini uraian terkait sumber daya - sumber daya dalam pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim:

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas maka Dinas Komunikasi dan

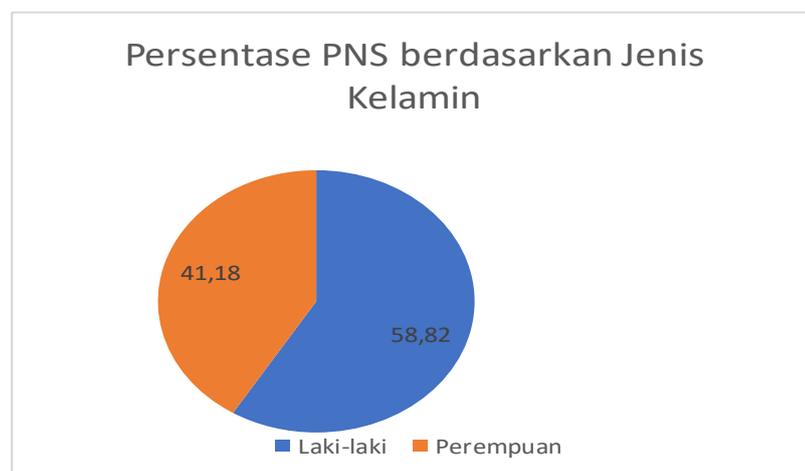
Informatika Kabupaten Muara Enim memiliki kekuatan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang yang terdiri dari pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 20 orang, sedangkan kelamin perempuan sejumlah 14 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sebaran PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1.	Laki-laki	20	58.82
2.	Perempuan	14	41.18
Jumlah			100

Sumber : Sub Bagian Umum Diskominfo Kabupaten Muara Enim Tahun 2023

Data tabel sebaran PNS berdasarkan jenis kelamin di atas bahwa menunjukkan tentang proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Proporsi presentase jumlah PNS berjenis laki-laki sebanyak 58,82% sedangkan proporsi presentase jumlah PNS berjenis perempuan sebanyak 41,18%. Data tersebut ditunjukkan melalui gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

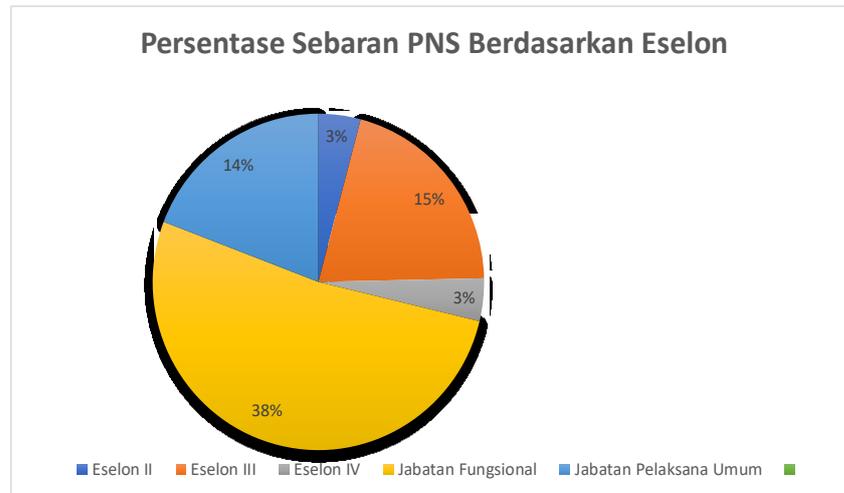
Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Data sebaran PNS berdasarkan eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa jumlah pegawai eselon II sebanyak 1 orang, jumlah pegawai eselon III sebanyak 5 orang, jumlah pegawai eselon IV sebanyak 1 orang, jumlah pegawai untuk jabatan fungsional sebanyak 14 orang, jumlah jabatan pelaksana umum sebanyak 14 orang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sebaran PNS Berdasarkan Eselon

Unit/Bidang	Kondisi saat ini					Kondisi Ideal				Kekurangan			
	Ess II	Ess III	Ess IV	Jafung	JPU	Ess III	Ess IV	Jafung	JPU	Ess III	Ess IV	Jafung	JPU
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat		1	1	2	5	1	1	2	9	-	-	-	4
PDIPS		1	-	3	3	1	-	3	9	-	-	-	6
E-Government		1	-	3	3	1	-	3	12	-	-	-	9
PKP		1	-	3	2	1	-	3	9	-	-	-	7
Persandian dan Keamanan Informasi		1	-	2	1	1	-	3	9	-	-	1	8
Jumlah	1	5	1	13	14	5	1	14	50	0	1	1	34
%	3	15	3	38	41								

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa PNS berdasarkan eselon terbanyak pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah staf/jabatan pelaksana umum dengan presentase sebesar 41%, sedangkan jumlah eselon terendah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim terdapat pada eselon II dan eselon IV dengan presentase sebesar 3%, selain itu presentase pegawai eselon III sebesar 15% dan presentase untuk jabatan fungsional sebesar 38%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2

Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Eselon

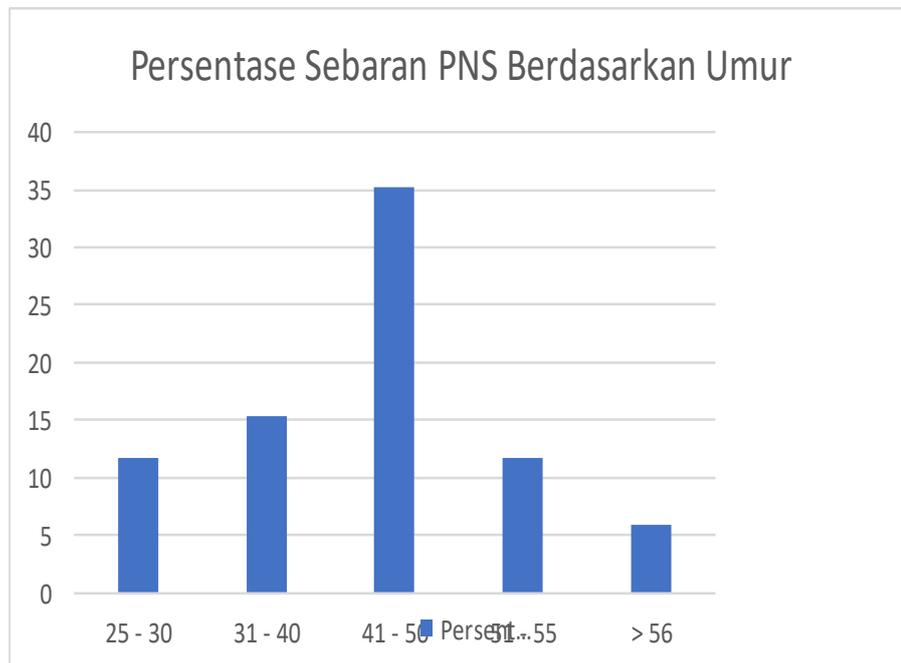
Data sebaran PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim berdasarkan umur didominasi oleh umur 41-50 tahun dengan jumlah sebanyak 12 pegawai, sedangkan dominasi kedua pegawai golongan umur 31-40 tahun sebanyak 12 pegawai, ketiga golongan umur 51-55 tahun sebanyak 4 pegawai, golongan 25-30 tahun sebanyak 4 pegawai, dan golongan umur >56 tahun sebanyak 2 pegawai. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim didominasi oleh pegawai yang cukup berpengalaman, maka akan memungkinkan sangat berimplikasi positif terhadap kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sebaran PNS Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	%
1	25 - 30 thn	4	11,77
2	31 - 40 thn	12	35,30
3	41 - 50 thn	12	35,30
4	51 - 55 thn	4	11,77
5	> 56 th	2	5,89
JUMLAH		34	

Berdasarkan gambar 2.3. berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan usia sebagai berikut persentase golongan umur 41-50 tahun sebesar 35,30%; persentase golongan umur 31-40 tahun sebesar 35,40%; persentase golongan umur 51-55 tahun sebesar 11,77%, persentase golongan umur >56 tahun sebesar 5,89%; dan persentase golongan umur 25-30 tahun sebesar 11,77%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.3

Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Umur

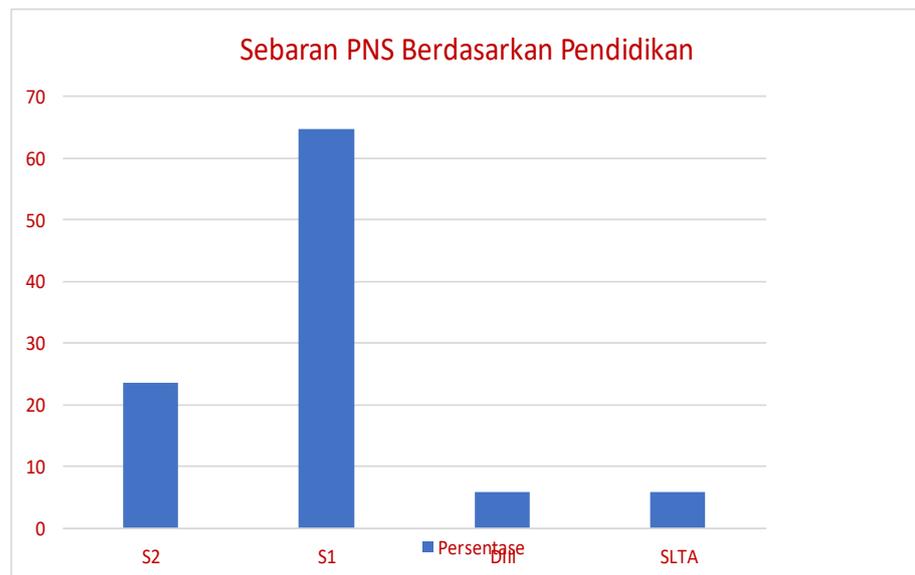
Data sebaran PNS berdasarkan komposisi pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, dengan jumlah pegawai yang sebanyak 34 orang, pegawai berpendidikan Sarjana (S2) sebanyak 8 orang, Sarjana (S1) sebanyak 22 orang, Diploma III (DIII) sebanyak 2 orang, pegawai yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sebanyak 2 orang, Data dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan PNS	Jumlah	%
1	SLTA	2 orang	5,89
2	D III	2 orang	5,89
3	S 1	22 orang	64,71
5	S 2	8 orang	23,53
Jumlah		34 Orang	100

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bahwa PNS berdasarkan pendidikan terbanyak pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah pendidikan S1 dengan presentase sebesar 64,71%, sedangkan jumlah eselon terendah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim terdapat pada pendidikan SLTA dan D III dengan presentase sebesar 5,89%, selain itu presentase pegawai dengan pendidikan S2 sebesar 25,53%. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:



Gambar 2.4

Persentase Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim

sudah cukup baik dengan sebagian besar SDM memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 64,71%. Akan tetapi masih terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang IT, khususnya tenaga programmer dan tenaga jaringan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan TIK dan pengamanan data dan informasi masih belum mendukung. Untuk itu, usaha untuk mendapat tambahan aparatur SDM sudah dilakukan, namun sampai saat ini masih belum terpenuhi.

2. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim diantaranya dalam peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung atau kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, infrastruktur serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas atau kegiatan. Secara umum jumlah sarana dan prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Daftar Sarana Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	TANAH		
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	139 m2	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN		
	Komputer		
	- P.C Unit	43	Baik



- Lap Top	18	Baik
- Note Book	1	Baik
- Tablet PC	1	Baik
- Personal Komputer lainnya	22	Baik
- Hard Disk	18	Baik
- Peralatan Minikomputer lainnya	1	Baik
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	Baik
- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
- Peralatan Personal Komputer lainnya	2	Baik
- Server	10	Baik
- Router	117	Baik
- Hub	71	Baik
- Modem	2	Baik
- Repeater and Transciever	8	Baik
- Kabel UTP	3	Baik
- Switch	2	Baik
- Acces Point	106	Baik
- Peralatan Jaringan lainnya	61	Baik
Alat Eksplorasi	2	Baik
- Converter	2	Baik
Alat Angkutan	19	Baik
- Kendaraan dinas roda 4 Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	Baik
- Kendaraan dinas roda 4 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	5	Baik
- Sepeda Motor	12	Baik
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9	Baik
- Tripod	2	Baik
- Spektrum Analyzer	1	Baik
- Global Positioning System	3	Baik
- Scanner (Universal Tester)	2	Baik
- Termometer Standar	1	Baik
Alat Kantor dan Rumah Tangga	475	Baik
- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Baik
- Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Baik



- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4	Baik
- Rak Besi	10	Baik
- Filing Cabinet Besi	7	Baik
- Brandkas	1	Baik
- Lemari Kaca	1	Baik
- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	16	Baik
- CCTV - Camera Control Television System	34	Baik
- Alat Penghancur Kertas	6	Baik
- Alat Pemotong Kertas	2	Baik
- Alat Pengaman / Sinyal	2	Baik
- Penangkal Petir	1	Baik
- LCD Projector/Infocus	3	Baik
- Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2	Baik
- Papan Nama Instansi	2	Baik
- Alat Kantor Lainnya	52	Baik
- Meja Kerja Besi/Metal	5	Baik
- Meja Kerja Kayu	3	Baik
- Kursi Besi/Metal	34	Baik
- Meja Resepsionis	1	Baik
- Meja Bundar	1	Baik
- Meja Biro	8	Baik
- Kursi Rapat	63	Baik
- Kursi Putar	14	Baik
- Meja Komputer	22	Baik
- Sofa	2	Baik
- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
- A.C. Sentral	1	Baik
- A.C. Split	20	Baik
- Alat Pendingin lainnya	1	Baik
- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
- Tabung Gas	1	Baik
- Rak Piring Alumunium	1	Baik
- Mixer	1	Baik
- Televisi	11	Baik
- Video Cassette	1	Baik
- Amplifier	1	Baik
- Loudspeaker	2	Baik



- Sound System	1	Baik
- Wireless	11	Baik
- Microphone	7	Baik
- Microphone Floor Stand	4	Baik
- Unit Power Supply	10	Baik
- Stabilisator	5	Baik
- Camera Video	3	Baik
- Tangga Aluminium	3	Baik
- Dispenser	2	Baik
- Handy Cam	4	Baik
- DVD Player	2	Baik
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	18	Baik
- Alat Pemadam/Portable	2	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
- Kursi Kerja Pejabat lainnya	23	Baik
- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	18	Baik
- Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	Baik
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	246	Baik
- Audio Mixing Portable	1	Baik
- Disc Record Player	1	Baik
- Microphone/Wireless MIC	1	Baik
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Baik
- peralatan studio audio lainnya (dst)	15	Baik
- Camera Electronic	67	Baik
- Video Processor	1	Baik
- Tripod Camera	2	Baik
- Lensa Kamera	2	Baik
- Layar Film/Projector	6	Baik
- Alat Studio Video Lainnya	3	Baik
- Alat Studio Lainnya	19	Baik
- Handy Talky (HT)	3	Baik
- Facsimile	4	Baik



	- Telopon digital	63	Baik
	- Alat komunikasi radio HF/FM	39	Baik
	- Mainframe	6	Baik
	- Antena UHF	1	Baik
	- Genzet	3	Baik
	Alat Laboratorium		
	- Digital indikator	1	Baik
	- tripod	1	Baik
	- Pinn Filter	1	Baik
	- Converter	2	Baik
	- Transmitter	1	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	139	Baik
	- Taman lainnya Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	133	Baik
	- Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain Jln. Lintas Sumatera Ujan Mas	50	Baik
	- Pagar Permanen Jln. Bambang Utoyo No.20 Muara Enim	756	Baik
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	- Instalasi Penangkal Petir Manual Kantor Camat Gunung Megang		Baik
	- Peralatan Instalasi listrik kantor kominfo jl. Bambang utoro		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor Camat Benakat		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain Kecamatan Lawang kidul		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor Camat muaa enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-Lain kantor DPRD Muara enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-lain Kantor Inspektorat Kab. Muara Enim		Baik
	- Jaringan Induk Distribusi Lain-lain Sekretariat ULP Kelurahan Tungkal		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas keci kecamatan gelumbang		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan Kelekar		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan Lembak		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil kecamatan lubai		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecamatan Rambang		Baik



	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil Kecamatan Rambang Dangku		Baik
	- Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas kecil Kecamatan Sungai Rotan		Baik
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain		Baik
	- Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas		Baik
5	Aset Lainnya		
	ASET TIDAK BERWUJUD		
	- Software	8	Baik
	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain		
	- Infocus		Rusak Berat
	- Proyektor		Rusak Berat

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dibentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 terakhir telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan tiga urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan berdasarkan UU no. 23 tahun 2008, yakni:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika dengan sub urusan yang menjadi kewenangan daerah:
 - a. Pengelolaan Informasi Publik
 - b. Penerapan Layanan e-Government
 - c. Pengelolaan Domain dan sub domain di Kabupaten Muara Enim
2. Urusan Persandian dengan sub urusan menjadi kewenangan daerah, yakni:



- a. Persandian untuk pengamanan Informasi daerah Kabupaten
- 3. Urusan Statistik dengan sub urusan kewenangan daerah yakni:
 - a. Pengelolaan statistik sektoral

Adapun kinerja pelayanan berkenaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim selama tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Muara Enim

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi tahun 2023	2019	2020	2021	2022	Proyeksi tahun 2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Indeks SPB	-	-	-	2,80	2,80	2,90	2,95	3,00	3,14	3,27	2,73	2,91	3,00	100%	100%	94,14 %	97%	100%			
2	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	-	-	-	80%	80%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Persentase OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase aplikasi yang terintegrasi	-	-	-	71,43% %	71,43% %	71,43% %	71,43 % %	71,43 % %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase desa blankspot yang tersedia internet gratis	-	-	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	100%	100%			
4	Persentase OPD yang memanfaatkan layanan pusat data	-	-	-	73,07 %	73,07 %	73,07 %	73,07 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase informasi, laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	standar																		
6	Persentase Publikasi Opini dan Aspirasi publik	-	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Rata-rata waktu menanggapi laporan	-	-	-	3 Hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
10	Persentase Media Komunikasi Publik yang dimanfaatkan di Kab. MuaraEnim	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase kerjasama media massa	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase jenis media komunikasi publik milik Pemda yang dikelola	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan penyiaran radio	-	-	-	-	40 km	40 kmb	40 km	40 km	-	40 km	40 km	40 km	40 km	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Layanan SPBE yang berpedoman pada manajemen keamanan informasi SPBE	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah ruangan yang dilaksanakan kontra penginderaan	-	-	-	3 Ruangan	3 Ruangan	3 Ruangan	7 Ruangan	7 Ruangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase informasi sandi yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim tahun 2019-2023. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa aja faktor-factoryang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Untuk lebih jelasnya, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Muara Enim

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(Rp)				Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-(%)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Pendapatan	865.000.000	545.000.000	551.843.742	492.911.718	545.000.000	868.972.980,70	808.973.074,49	526.091.504	709.023.286	100	100	100	100		
-															
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.442.039.836,58	5.791.821.838,29	5.813.999.962	7.091.503.461	7.023.849.888	6.847.646.322	5.458.120.505	5.068.674.469	6.780.055.970	92,02	95	87,18	95,61		
Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.454.994.973	6.596.756.800	7.787.831.696	7.443.862.200	6.592.582.400	2.351.671.604	6.427.583.084	7.703.786.316	7.351.930.398	95,80	97,44	98,92	98,76		
Program Aplikasi Informatika	3.597.192.000	3.514.470.450	6.174.973.045	5.718.240.182	277.507.100	3.527.430.938	3.448.886.509,50	5.902.792.890	5.624.873.519	98,06	98,14	95,59	98,37		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	257.423.000	225.772.000	265.945.291	423.173.400	339.268.500	239.662.263	224.826.598	264.795.600	418.897.883	93,10	99,58	99,57	98,99		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	185.996.000	97.731.000	213.200.972	292.622.100		148.610.484	97.731.000	212.329.200	291.303.940	79,90	96,24	99,59	99,55		



2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan sasaran layanan dari pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim. Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Masyarakat Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan dan kelompok informasi masyarakat Kabupaten Muara Enim khususnya.
2. Organisasi Perangkat Daerah
3. Awak Media

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO

3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa Dinas Kependudukan dan dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam pelayanan komunikasi dan informatika sebagai tupoksi, saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan/transparansi dan keberpihakan terhadap rakyat, khususnya menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam program dan pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-government, sebagaimana diwujudkan pada Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Bahwa setiap pimpinan lembaga negara, kepala daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan e-Government. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup beberapa aktivitas yaitu :

- a. Pengolahan data,
- b. Pengelolaan informasi,
- c. Sistem manajemen
- d. Proses kerja.

Berdasarkan perjalanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini, tantangan utama pengembangan e-Government adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Sehubungan dengan pengembangan e-Government, langkah awal yang dilaksanakan adalah memfasilitasi akses informasi elektronik berupa website pemerintah daerah. Saat ini, website Pemerintah Kabupaten Muara Enim sudah dapat digunakan dan diakses oleh pengguna yang manfaatnya sudah dapat dirasakan secara signifikan. Berbagai konten dan design tiap saat tentu memerlukan pembaharuan sehingga kandungan berita di dalamnya tetap ter-update.

Masyarakat sudah dapat memanfaatkan website Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini dengan alamat www.muaraenimkab.go.id. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang informasi, kegiatan informasi keliling juga masih sangat relevan dan rutin dilaksanakan. Tatap muka berupa dialog interaktif melalui radio, pertemuan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang ada pada setiap kecamatan juga mendapat prioritas yang tetap dilaksanakan. Selanjutnya, dalam perkembangan global dan peradaban yang semakin maju, dampak informasi begitu penting sebagai dasar dalam bertindak. Siapa yang cepat menerima informasi maka ia akan lebih dulu bisa bertindak. Dalam media akses informasi, media center yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sarana bagi pengunjung dalam mengakses informasi.

Melalui hotspot yang tersedia, para pengunjung dapat memanfaatkannya walaupun dalam penggunaannya terhalang oleh kapasitas pemakai yang menyebabkan daya akses sedikit lambat. Berdasarkan atas telaah kebutuhan informasi dan komunikasi berbasis elektronik seperti di atas, kiranya berbagai hambatan yang timbul di antaranya adalah konsistensi perhatian terhadap sumber daya. Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan

prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika.

Sumber daya aparatur diusahakan dengan penempatan kapasitas sesuai dengan bidang dan kualifikasi pendidikan. Pengembangan daya dukung anggaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim diusahakan dengan usulan dan lobi kepada pengambil kebijakan yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi komunikasi dan informatika bagi kepentingan publik.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangannya dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

a. Analisis terhadap Permasalahan I

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan 1

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Permasalahan	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Jumlah SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK. 2. Terbatasnya SDM yang trampil dan professional dengan latar belakang TIK 3. Belum selarasnya data yang dimiliki pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten 4. Sarana yang tersedia belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya penambahan SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK 2. Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK. 3. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam sinkronisasi data 4. Sebaran Menara Telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan penambahan SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK belum terpenuhi 2. Minimnya kegiatan pelatihan/bimtek bersertifikasi bagi SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK 3. Minimnya agenda koordinasi dan kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam Pengembangan SPBE 4. Faktor Geografis Kabupaten Muara Enim dan kewenangan pembanguna tower



		5. Prasarana yang tersedia belum memadai	5. Belum optimalnya perangkat pendukung layanan jaringan intranet pemerintah	5. Minimnya dukungan anggaran
		6. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK	6. Belum maksimalnya penerapan literasi digital dilingkungan masyarakat	6. Kegiatan literasi digital masih sangat jarang dilaksanakan

b. Analisis terhadap Permasalahan 2

Tabel 3.2
Rumusan Permasalahan 2

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Permasalahan	Serabut Masalah
2	Belum optimalnya Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Jumlah SDM Tenaga teknis/tenaga ahli Komunikasi dan jurnalistik 2. Terbatasnya SDM yang trampil dan professional dengan latar belakang komunikasi dan jurnalistik 3. Pelayanan informasi publik, lapor, pengelolaan data dan statistik belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya penambahan SDM Tenaga teknis/tenaga ahli komunikasi dan jurnalistik 2. Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM Tenaga teknis/tenaga ahli komunikasi dan jurnalistik 3. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam sinkronisasi, akurasi akurasi data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan penambahan SDM Tenaga teknis/tenaga ahli komunikasi dan jurnalistik belum terpenuhi 2. Minimnya kegiatan pelatihan/bimtek bersertifikasi bagi SDM Tenaga teknis/tenaga ahli komunikasi dan jurnalistik 3. Minimnya agenda koordinasi dan kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam Pengembangan keterbukaan informasi publik



		4. Sarana yang tersedia belum memadai	4. Adanya kesenjangan informasi pada masyarakat dikawasan tertentu	4. Sebaran Menara Telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim
		5. Prasarana yang tersedia belum memadai	5. Belum optimalnya pemberdayaan media komunikasi milik sendiri dan mengembangkan potensi komunikasi masyarakat	5. Belum optimalnya konten dan diseminasi informasi pemerintah dan publik
		6. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan media digital	6. Belum maksimalnya penerapan literasi digital dilingkungan masyarakat	6. Kegiatan literasi digital masih sangat jarang dilaksanakan

Visi, Misi Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam RPD 2024 – 2026 menetapkan Visi Kabupaten sebagai berikut:

VISI

“ Muara Enim Sehat, Mandiri dan Sejahtera “

Dengan adanya Visi tersebut diharapkan Muara Enim dapat menjadi Kabupaten yang Sehat, Mandiri dalam berbagai aspek dan bisa Sejahtera.

MISI

Misi menjelaskan bahwa gambaran visi yang ingin dicapai dan upaya apa yang harus dilakukan agar visi tersebut dapat tercapai. Rumusan misi menjadi penting untuk menjadi kerangka tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan cara serta strategi apa yang akan ditempuh. Misi Kabupaten Muara Enim yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Jasmani

2. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Rohani
3. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Berkualitas
5. Mewujudkan Lembaga Pemerintahan yang Baik
6. Mewujudkan Perekonomian yang mempunyai Daya Saing Tinggi
7. Mewujudkan Masyarakat yang dapat Memeuhi Hak-Hak Dasar
8. Mewujudkan Masyarakat yang Semakin Dapat Mengaktualisasikan *Diri*

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Penyusunan Rencana Strategis OPD diharapkan selaras dengan rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bahan komparasi capaian sasaran dalam renstra OPD.

Tabel 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD	Sasaran pada Renstra Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase OPD yang menerapkan e-Government	100 %	Persentase Layanan publik yang terintegrasi dengan kabel fiber optik	Terintegrasinya Layanan Publik
2.	Persentase OPD yang menerapkan PPID	100 %		Layanan Keterbukaan Informasi publik untuk masyarakat dan Badan Publik
3.	Cakupan wilayah yang terhubung jaringan internet dan informasi	100 %	Persentase pengguna yang mengakses internet	Pelayanan internet gratis sampai wilayah Kecamatan
4.	Cakupan media yang digunakan dalam diseminasi	100 %	Jumlah kerjasama dengan Media Massa	Terjalin kerjasama dengan seluruh media massa dalam rangka

	informasi publik Kabupaten Muara Enim			penyebarluasan informasi
--	---	--	--	-----------------------------

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, yakni:

Faktor Pendorong :

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan.
2. Meningkatkan pelayanan jaringan Telekomunikasi Melalui penggunaan menara telekomunikasi
3. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel (Hotspot/wifi) pada berbagai kawasan.
4. Menyediakan data-data statistik sektoral yang dapat diakses secara luas oleh yang mem butuhkan

Faktor Penghambat

1. Faktor Geografis Kabupaten Muara Enim.
2. Sebaran Menara Telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim
3. Masih kurangnya Tenaga teknis/tenaga ahli TIK.
4. Belum selarasnya data yang dimiliki pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

Gambaran hubungan RTRW dengan fungsi pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Muara Enim

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan Pelayanan jaringan Telekomunikasi	Kewenangan dalam menangani TIK,	Kabupaten Muara Enim
2	Pengembangan jaringan Nirkabel (Hotspot/wifi)	Belum terintegrasi dan tertata dengan baik	Pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama	Legalitas Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	Kabupaten Muara Enim
			Pengawasan dan pengaturan pembangunan BTS	Legalitas Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	Kabupaten Muara Enim
3	pengembangan sistem telekomunikasi untuk publik	Telah ada sistem komunikasi publik, namun tingkat partisipasi masyarakat belum optimal	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi Telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Distribusi Sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kabupaten Muara Enim

Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program Kabupaten diturunkan menjadi Program Dinas Komunikasi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah

dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada tahap Rancangan awal RPD. Berikut tabel hasil analisis terhadap dokumen KLHS Dinas Komunikasi dan Informatika yakni :

Tabel 3.5
Hasil analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Muara Enim

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)		(3)	(4)	(5)
1	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Kelayakan teknis BTS dengan lingkungan sekitar	Diskominfo memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan monitoring menara	Selama ini pengawasan dan monitoring telah dilaksanakan, namun masih terkendala dalam kewenangan

3.2 Isu-isu Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 bertugas menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, serta persandian dan statistik. Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim ke depan, yang menonjol lebih menitikberatkan pada pembentukan kabupaten Muara Enim menjadi kota cerdas (*smart city*).

Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknokratik) maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis dimaksud sebagai berikut :

1. Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana TIK

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mengubah sistem pelayanan publik secara bertahap dari semula bersifat manual menjadi layanan berbasis TIK. Sistem pelayanan publik berbasis TIK pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan fungsi aparatur. Lebih jauh, pelayanan publik berbasis TIK meningkatkan aspek transparansi aparatur



sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, sistem yang ada sejauh ini masih terkendala dalam penyediaan sarana dan prasarana TIK. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan sistem pelayanan publik menjadi tidak optimal.

2. Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya.

3. Tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa akses yang kurang baik bagi masyarakat.

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Muara Enim. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

4. Perubahan paradigma dan kewenangan urusan persandian

Transformasi fungsi persandian yang awalnya pengamanan terhadap informasi rahasia menjadi kegiatan untuk mengamankan informasi dan aset informasi secara keseluruhan. Persandian menjamin keamanan e-Government dan mendukung keamanan pembentukan ekosistem kota cerdas. Keamanan



informasi perlu mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat. Hal ini memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pemanfaatan mobile internet, cloud computing, internet of things, big data analytics dan artificial intelligence.

5. Data yang beragam dan belum terintegrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan akan selalu membutuhkan data statistik untuk menerangkan kondisi dan hasil capaian keberhasilan pembangunan di kabupaten.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan

Tujuan adalah pernyataan umum tentang “ke arah mana” suatu organisasi akan berada di masa depan/ Suatu kehendak yang ingin dicapai dengan upaya keras atau sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d. 5 tahun mendatang.

Sasaran

Sasaran (objectives) merupakan target yang spesifik dan terukur dari tiap tujuan Perencanaan/ Sesuatu yang diupayakan untuk diselesaikan atau menjadi target.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai rencana pembangunan daerah (RPD) kabupaten tahun 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun renstra perangkat daerah kabupaten tahun 2024 - 2026, dimana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 – 2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2024 – 2026 dengan memperhatikan tujuan, sasaran rencana pembangunan daerah kabupaten tahun 2024-2026 dan norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Sehingga Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026 :

1. Tujuan : Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat
Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatnya kerukunan antar umat bergama
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Tujuan : Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
Meningkatnya daya saing daerah
3. Tujuan : Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia
Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Meningkatnya daya beli masyarakat
4. Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas dan tatakelola pemerintahan
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah
Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
5. Tujuan : Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
Sasaran : Menurunkan tingkat pengangguran terbuka
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk
6. Tujuan : Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah
Sasaran : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang tiga tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimat5e goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Muara Enim. Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim yang telah ditetapkan, dan telah dilakukan analisis terhadap permasalahan sehingga ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

Tujuan Perangkat Daerah

1. Tujuan

- Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

2. Sasaran

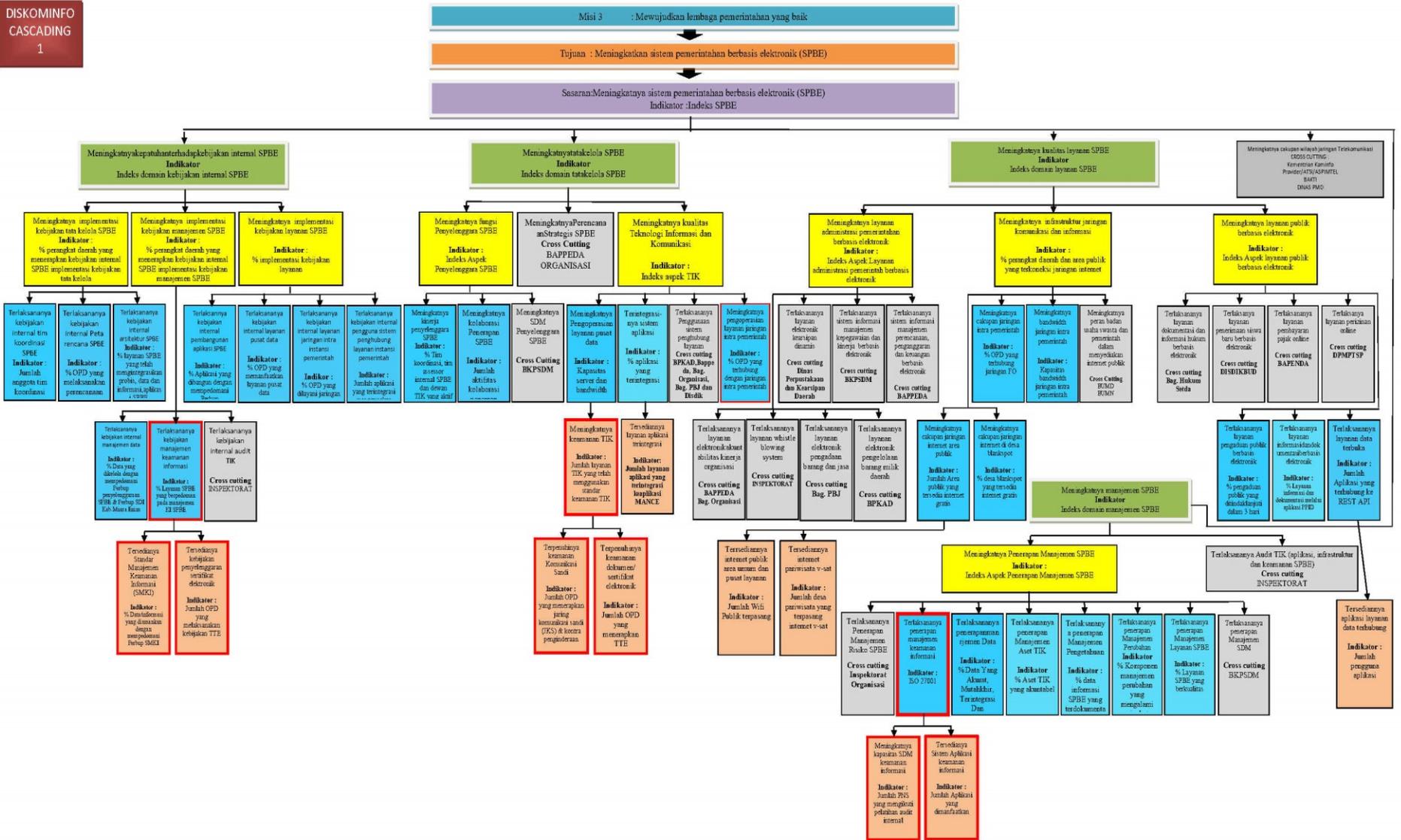
- Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
- Meningkatnya keterbukaan informasi publik

Untuk lebih jelas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat tabel 4.1 dibawah ini :

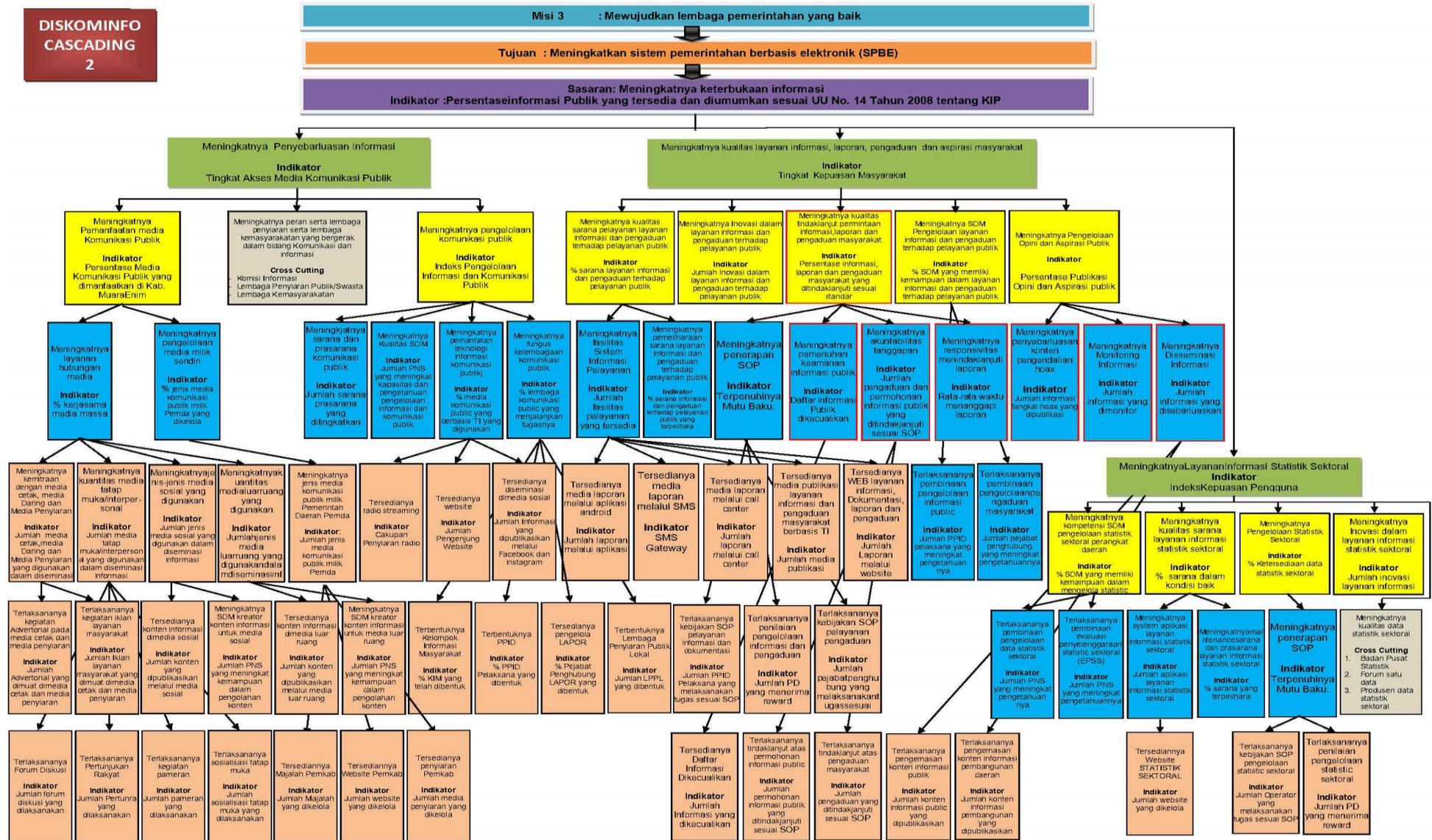
TABEL 4.1							
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika							
Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Rumus	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke		
					2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Tujuan 1	Sasaran 1.1					
	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	<i>Nilai yang dikeluarkan oleh Kemenpan dan hasil self assessment penyelenggaraan SPBE</i>	3,00	3,1	3,2
		2. Meningkatnya keterbukaan informasi	Persentase Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia dan diumumkan}}{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik}}$	100 %	100 %	100 %

4.2. Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

**DISKOMINFO
CASCADING
1**



**DISKOMINFO
CASCADING
2**



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Sasaran dan Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design (program program) perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dihasilkan dari hasil peta analisis SWOT yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) sebagai berikut :

Analisis SWOT dalam Peta Strategi I sasaran meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik

<p>SW</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">OT</p>	<p>S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Infrastruktur jaringan intra pemerintah 2. Tersediannya internet gratis di area publik 3. Tersedianya aplikasi online 	<p>W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Jumlah SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK. 2. Terbatasnya SDM yang trampil dan professional dengan latar belakang TIK
<p>O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang Komunikasi dan Informatika 2. Adanya dukungan APBD 3. Adanya dukungan swasta 4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan Internet Intra Pemerintah dan internet publik 2. Meningkatkan Pengintegrasian Sistem system Informasi (aplikasi) dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan public 3. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi (aplikasi) dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekrutan SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK. 2. Mengembangkan kapasitas SDMTenaga teknis/tenaga ahli TIK.
<p>T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Geografis Kabupaten Muara Enim 2. Sebaran Menara Telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim 3. Rentan terjadinya peretasan informasi dan data 4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi melalui penggunaan menara/satelit telekomunikasi. 2. Meningkatkan Sistem keamanan informasi dan jaringan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi tenaga teknis yang ada dalam meningkatkan pelayanan jaringan internet intra pemerintah dan internet publik 2. Kerjasama provider/pendor dalam meningkatkan pelayanan jaringan intra pemerintah dan internet publik

Dari analisis SWOT terhadap sasaran meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Terintegrasinya infrastruktur TIK diseluruh OPD dan area publik
2. Tersedianya aplikasi online

Faktor kelemahan yang perlu diperhatikan :

1. Terbatasnya Jumlah SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK.
2. Terbatasnya SDM yang trampil dan professional dengan latar belakang TIK

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang Komunikasi dan Informatika
2. Adanya dukungan APBD
3. Adanya dukungan swasta
4. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Faktor Geografis Kabupaten Muara Enim
2. Sebaran Menara Telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim
3. Rentan terjadinya peretasan informasi dan data
4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas

Strategi Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Strategi dari SWOT	Strategi
1. Meningkatkan layanan Internet Intra Pemerintah dan internet public	Meningkatkan layanan intra pemerintah dan internet public dengan meningkatkan keamanan informasi dan jaringan (S1)
2. Meningkatkan Sistem keamanan informasi dan jaringan.	
3. Meningkatkan Pengintegrasian Sistem system Informasi (aplikasi) dan Database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan integrasi system informasi (aplikasi) dn database dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (S2)
4. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi (aplikasi) dan database dalam rangka meningkatkan kualitas	



<p>elayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi melalui penggunaan menara/satelit telekomunikasi. 6. Kerjasama provider/pendor dalam meningkatkan pelayanan jaringan intra pemerintah dan internet publik 7. Perekrutan SDM Tenaga teknis/tenaga ahli TIK. 8. Mengembangkan kapasitas SDMTenaga teknis/tenaga ahli TIK 9. Optimalisasi tenaga teknis yang ada dalam meningkatkan pelayanan jaringan internet intra pemerintah dan internet public 	<p>Kerjasama meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi dan sinyal internet (S3)</p> <p>Pengembangan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK (S4)</p>
--	---

Tabel 5.1
Sasaran dan Strategi 1

Sasaran	Strategi
<p>Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>Meningkatkan layanan intra pemerintah dan internet public dengan meningkatkan keamanan informasi dan jaringan (S1)</p> <p>Meningkatkan integrasi system informasi (aplikasi) dan database dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (S2)</p> <p>Kerjasama meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi dan sinyal internet (S3)</p> <p>Pengembangan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK (S4)</p>

Analisis SWOT dalam Peta Strategi II sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik

<p>SW</p> <p>OT</p>	<p>S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Infrastruktur jaringan intra pemerintah 2. Tersediannya internet gratis di area public 3. Tersediannya layanan informasi publik dan lapor berbasis elektronik 4. Tersedianya media komunikasi publik milik sendiri 	<p>W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Jumlah SDM Tenaga teknis/tenaga ahli Komunikasi dan jurnalistik. 2. Terbatasnya SDM yang trampil dan professional dengan latar belakang komunikasi dan jurnalistik 3. layanan informasi publik, lapor, pengelolaan data dan statistik belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat
<p>O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan APBD 2. Adanya dukungan swasta 3. Perkembangan teknologi dan informasi 4. Kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang Komunikasi dan Informatika 5. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan 6. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi public, aduan masyarakat dan statistic sektoral 2. Mengembangkan pendayagunaan media milik sendiri dan kemitraan media 3. Meningkatkan diseminasi informasi 4. Meningkatkan kualitas permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi stakeholders 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekrutan SDMTenaga teknis/tenaga ahli Komunikasi dan jurnalistik 2. Mengembangkan kapasitas SDM SDMTenaga teknis/tenaga ahli Komunikasi dan jurnalistik 3. Melakukan koordinasi baik vertical maupun horisontal dalam kegiatan pelayanan informasi publik, lapor, pengelolaan data dan statistic
<p>T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Globalisasi informasi yang berdampak Pesatnya perkembangan TIK 2. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata 3. Kesenjangan informasi di masyarakat 4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan informasi yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan media komunikasi milik sendiri dan mengembangkan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi 2. Penyajian data dan hasil pengelolaannya yang berkualitas dalam bentuk yang mudah dimengerti berbasis TIK 3. Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan pelayanan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi tenaga teknis yang ada dalam meningkatkan pelayanan informasi publik dan data 2. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam mengurangi kesenjangan informasi 3. Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat

Dari analisis SWOT terhadap sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Terintegrasinya infrastruktur TIK diseluruh OPD dan area publik
2. Tersediannya layanan informasi publik dan lapor berbasis elektronik
3. Tersedianya media komunikasi publik milik sendiri

Faktor kelemahan yang perlu diperhatikan :

1. Terbatasnya Jumlah SDM Tenaga teknis/tenaga ahli Komunikasi dan jurnalistik.
2. Terbatasnya SDM yang trampil dan professional dengan latar belakang komunikasi dan jurnalistik
3. layanan informasi publik, lapor, pengelolaan data dan statistik belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Adanya dukungan APBD
2. Adanya dukungan swasta
3. Perkembangan teknologi dan informasi
4. Kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang Komunikasi dan Informatika
5. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
6. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Globalisasi informasi yang berdampak Pesatnya perkembangan TIK
2. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
3. Kesenjangan informasi di masyarakat
4. Tuntutan masyarakat akan pelayanan informasi yang berkualitas

Strategi Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

Strategi dari SWOT	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi public, aduan masyarakat dan statistic sektoral 2. Meningkatkan kualitas permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi stakeholders 3. Penyajian data dan hasil pengelolaannya yang berkualitas dalam bentuk yang mudah dimengerti berbasis TIK 	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan informasi public, aduan masyarakat dan statistic sektoral dengan penyajian data kedalam bentuk yang mudah dimengerti berbasis TIK agar dapat meningkatkan kualitas permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi public dan stakeholder (S1)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Mengembangkan pendayagunaan media milik sendiri dan kemitraan media 5. Meningkatkan diseminasi informasi 6. Memberdayakan media komunikasi milik sendiri dan mengembangkan potensi komunikasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi 7. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam mengurangi kesenjangan informasi 	<p>Mengembangkan pendayagunaan media komunikasi milik sendiri dan kemitraan media untuk mengembangkan potensi komunikasi masyarakat dan diseminasi informasi agar dapat mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatnya kualitas pelayanan informasi (S2)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 8. Melakukan koordinasi baik vertical maupun horisontal dalam kegiatan pelayanan informasi publik, lapor, pengelolaan data dan statistic 9. Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan pelayanan informasi 10. Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat 	<p>Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan penyebaran informasi dan ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat (S3)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 11. Perekrutan SDM Tenaga teknis/tenaga ahli Komunikasi dan jurnalistik 12. Mengembangkan kapasitas SDM SDM Tenaga teknis/tenaga ahli Komunikasi dan jurnalistik 13. Optimalisasi tenaga teknis yang ada dalam meningkatkan pelayanan informasi publik dan data 	<p>Meningkatkan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang komunikasi dan jurnalistik dalam meningkatkan pelayanan informasi dan pengelolaan data statistik (S4)</p>

Tabel 5.2
Sasaran dan Strategi 2

Sasaran	Strategi
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan informasi public, aduan masyarakat dan statistic sektoral dengan penyajian data kedalam bentuk yang mudah dimengerti berbasis TIK agar dapat meningkatkan kualitas permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi public dan stakeholder (S1)</p> <p>Mengembangkan pendayagunaan media komunikasi milik sendiri dan kemitraan media untuk mengembangkan potensi komunikasi masyarakat dan diseminasi informasi agar dapat mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatnya kualitas pelayanan informasi (S2)</p> <p>Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan penyebarluasan informasi dan ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat (S3)</p> <p>Meningkatkan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang komunikasi dan jurnalistik dalam meningkatkan pelayanan informasi dan pengelolaan data statistik (S4)</p>

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Adapun arah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mengatasi isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan secara bertahap selama 3 (Tiga) tahun kedepan sebagai penjabaran strategi adalah sebagai berikut :

5.3 Arah kebijakan

Sasaran	Indikator Sasaran	Arah Kegijakan		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan layanan intra pemerintah dan internet public dengan meningkatkan keamanan informasi dan jaringan (S1)	Peningkatan layanan intra pemerintah dan internet public dengan meningkatkan keamanan informasi dan jaringan (S1)	Peningkatan layanan intra pemerintah dan internet public dengan meningkatkan keamanan informasi dan jaringan (S1)
		Peningkatan integrasi system informasi (aplikasi) dn database dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (S2)	Peningkatan integrasi system informasi (aplikasi) dn database dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (S2)	Peningkatan integrasi system informasi (aplikasi) dn database dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (S2)
		Kerjasama Peningkatan jangkauan jaringan telekomunikasi dan sinyal internet (S3)	Kerjasama Peningkatan jangkauan jaringan telekomunikasi dan sinyal internet (S3)	Kerjasama Peningkatan jangkauan jaringan telekomunikasi dan sinyal internet (S3)
		Pengembangan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK (S4)	Pengembangan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK (S4)	Pengembangan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK (S4)
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Peningkatan kualitas pelayanan informasi public, aduan masyarakat dan statistic sektoral dengan penyajian data kedalam bentuk yang mudah dimengerti	Peningkatan kualitas pelayanan informasi public, aduan masyarakat dan statistic sektoral dengan penyajian data kedalam bentuk yang mudah dimengerti	Peningkatan kualitas pelayanan informasi public, aduan masyarakat dan statistic sektoral dengan penyajian data kedalam bentuk yang mudah dimengerti



		berbasis TIK agar dapat meningkatkan kualitas permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi public dan stakeholder (S1)	berbasis TIK agar dapat meningkatkan kualitas permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi public dan stakeholder (S1)	berbasis TIK agar dapat meningkatkan kualitas permintaan data dan hasil pengelolaannya bagi public dan stakeholder (S1)
		Pengembangan pendayagunaan media komunikasi milik sendiri dan kemitraan media untuk mengembangkan potensi komunikasi masyarakat dan diseminasi informasi agar dapat mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatnya kualitas pelayanan informasi (S2)	Pengembangan pendayagunaan media komunikasi milik sendiri dan kemitraan media untuk mengembangkan potensi komunikasi masyarakat dan diseminasi informasi agar dapat mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatnya kualitas pelayanan informasi (S2)	Pengembangan pendayagunaan media komunikasi milik sendiri dan kemitraan media untuk mengembangkan potensi komunikasi masyarakat dan diseminasi informasi agar dapat mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatnya kualitas pelayanan informasi (S2)
		Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan penyebaran informasi dan ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat (S3)	Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan penyebaran informasi dan ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat (S3)	Kerjasama baik vertical/horizontal dan swasta dalam meningkatkan jangkauan penyebaran informasi dan ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat (S3)
		Peningkatan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang komunikasi dan jurnalistik dalam	Peningkatan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang komunikasi dan jurnalistik dalam	Peningkatan manajemen SDM yang memiliki kompetensi dibidang komunikasi dan jurnalistik dalam



		meningkatkan pelayanan informasi dan pengelolaan data statistik(S4)	meningkatkan pelayanan informasi dan pengelolaan data statistik (S4)	meningkatkan pelayanan informasi dan pengelolaan data statistik (S4)
--	--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana dan Program Kegiatan

Program SKPD merupakan Program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana Program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan SKPD di dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini di dasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD dimana penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah dengan memperhatikan penyelarasan program prioritas nasional RPJMN tahun 2020 – 2024, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) renstra perangkat daerah, evaluasi kontribusi (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome), isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Adapun Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam rencana strategis tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- f. Evaluasi kinerja perangkat daerah



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - c. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan barang milik daerah SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi kunjungan tamu ditargetkan
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan
 - b. Pengadaan mebel
7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

- 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Monitoring opini dan aspirasi publik
 - b. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - d. Pengelolaan media komunikasi publik
 - e. Pelayanan informasi publik
 - f. Layanan hubungan media
 - g. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - h. Penyelenggaraan hubungan masyarakat

b. Program Aplikasi Informatika

- 1. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
- b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

- d. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota
 1. Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026 secara rinci sebagaimana terdapat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tahun 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Outcome)	Kondisi Awal Renstra (2023)	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2	16	03				Indeks SPBE	2,95	3		3,1		3,2		3,2	
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100%	100%	11.747.952.546	100%	12.922.745.900	100%	14.215.020.000	100%	14.215.020.000	
		2	16	03	2.01	2.01	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase OPD yang terhubung jaringan VPN	100%	100%	10.008.615.800	100%	11.009.477.000	100%	12.110.424.600	100%	12.110.424.600
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 (Vsat, Metro-e Kecamatan, Jaringan FO antar OPD, Collacation)	4 (Vsat, Metro-e Kecamatan, Jaringan FO antar OPD, Collacation)	10.008.615.800	4 (Vsat, Metro-e Kecamatan, Jaringan FO antar OPD, Collacation)	11.009.477.000	4 (Vsat, Metro-e Kecamatan, Jaringan FO antar OPD, Collacation)	12.110.424.600	4 (Vsat, Metro-e Kecamatan, Jaringan FO antar OPD, Collacation)	12.110.424.600	
		2	16	03	2.02	2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Indeks aspek kelembagaan		2,4	1.739.336.746	2,4	1.913.268.900	2,4	2.104.595.400	2,40	1.913.268.900
							- Indeks aspek TIK			2,5			3		3		3
							- Indeks strategi dan perencanaan			3			2,5		3		3

						Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen (SPBE, pengawasan menara Telekomunikasi)	2 Dokumen (SPBE, pengawasan menara Telekomunikasi)	187.608.700	2 Dokumen (SPBE, pengawasan menara Telekomunikasi)	206.369.000	2 Dokumen (SPBE, pengawasan menara Telekomunikasi)	227.005.800	2 Dokumen (SPBE, pengawasan menara Telekomunikasi)	227.005.800	
						Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	355.054.346	2 Aplikasi	390.559.000	2 Aplikasi	429.614.800	2 Aplikasi	429.614.800	
						Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	546.404.700	1 Dokumen	601.045.000	1 Dokumen	661.149.400	1 Dokumen	661.149.400	
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 (Dokumen Pemeliharaan CCTV, Jaringan LAN, Jaringan FO)	3 (Dokumen Pemeliharaan CCTV, Jaringan LAN, Jaringan FO)	650.269.000	3 (Dokumen Pemeliharaan CCTV, Jaringan LAN, Jaringan FO)	715.295.900	3 (Dokumen Pemeliharaan CCTV, Jaringan LAN, Jaringan FO)	786.825.400	3 (Dokumen Pemeliharaan CCTV, Jaringan LAN, Jaringan FO)	786.825.400	
			2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90%	90%	447.789.500,00	90%	492.568.200,00	90%	541.824.800,00	90%	541.824.800
			2	21	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi sandi yang diamankan	100%	100%	339.502.500,00	100%	373.452.600,00	100%	410.797.700,00	100%	410.797.700
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	174.387.200	4 Laporan	191.825.800	4 Laporan	211.008.300	4 Laporan	211.008.300	

						Sub Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 OPD	25 OPD	165.115.300	25 OPD	181.626.800	25 OPD	199.789.400	25 OPD	199.789.400	
		2	21	02	2.02	2.02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan jaring komunikasi sandi	9 OPD	23 OPD	108.287.000	29 OPD	119.115.600	35 OPD	131.027.100	35 OPD	131.027.100
							Sub Kegiatan Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	9 OPD	23 OPD	108.287.000	29 OPD	119.115.600	35 OPD	131.027.100	35 OPD	131.027.100
	Meningkatnya keterbukaan informasi						Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	90%	100%		100%		100%		100%		
		2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan	100%	100%	7.977.101.300,00	100%	8.774.810.700	100%	9.652.291.050	100%	9.652.291.050
		2	16	02	2.01	2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	7.977.101.300,00	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	11.009.477.000	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	9.652.291.050,00	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)	6 Jenis Media (Media cetak, Media Penyiaran, Media Daring, Media Sosial, Media Luar Ruang dan Media Tatap Muka)
							Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen hasil monitoring	1 dokumen hasil monitoring	223.704.900	1 dokumen hasil monitoring	246.075.300	1 dokumen hasil monitoring	270.682.800	1 dokumen hasil monitoring	270.682.800

						Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	-	1 dokumen	193.887.800	1 dokumen	213.276.500	1 dokumen	234.604.000	1 dokumen	234.604.000	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	5 Dokumen	955.625.500	5 Dokumen	1.051.187.900	5 Dokumen	1.156.306.600	5 Dokumen	1.156.306.600	
						Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	488.834.000	1 Dokumen	537.717.400	1 Dokumen	591.489.000	1 Dokumen	591.489.000	
						Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen hasil monitoring pelayanan informasi publik	1 dokumen hasil monitoring pelayanan informasi publik	326.475.100	1 dokumen hasil monitoring pelayanan informasi publik	359.122.500	1 dokumen hasil monitoring pelayanan informasi publik	395.034.750	1 dokumen hasil monitoring pelayanan informasi publik	395.034.750	
						Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 layanan media center	1 layanan media center	60.504.000	1 layanan media center	66.554.300	1 layanan media center	73.209.600	1 layanan media center	73.209.600	
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 KIM	126 KIM	274.715.000	184 KIM	302.186.400	245 KIM	332.404.900	245 KIM	332.404.900	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	7 Dokumen	7 Dokumen	5.453.355.000	7 Dokumen	5.998.690.400	7 Dokumen	6.598.559.400	7 Dokumen	6.598.559.400	
			2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang di mutakhirkan	80%	80%	503.424.000	80%	553.766.100	80%	609.142.600	80%	609.142.600
			2	20	02	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media penyajian data statistik sektoral	2 (IPM, Indikator Sosial Ekonomi, Aplikasi Sister)	2 (IPM, Indikator Sosial Ekonomi, Aplikasi Sister)	503.424.000	2 (IPM, Indikator Sosial Ekonomi, Aplikasi Sister)	553.766.100	2 (IPM, Indikator Sosial Ekonomi, Aplikasi Sister)	609.142.600	2 (IPM, Indikator Sosial Ekonomi, Aplikasi Sister)	609.142.600

					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 (dokumen IPM, indikator sosial ekonomi, pendataan potensi desa)	3 (dokumen IPM, indikator sosial ekonomi, analisis gini ratio)	316.396.600	3 (dokumen IPM, indikator sosial ekonomi, analisis gini ratio)	348.036.100	3 (dokumen IPM, indikator sosial ekonomi, analisis gini ratio)	382.839.600	3 (dokumen IPM, indikator sosial ekonomi, analisis gini ratio)	382.839.600
					Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	200 Orang	187.027.400	200 Orang	205.730.000	200 Orang	226.303.000	200 Orang	226.303.000
				X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	7.466.980.043	100%	8.211.875.000	100%	8.588.103.040	100%	5.742.889.928
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	47.383.900	100%	52.122.000	100%	57.334.200	100%	109.701.500
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	20.363.200	1 dokumen	22.399.500	1 dokumen	24.639.450	1 dokumen	55.402.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.549.200	1 dokumen	9.404.000	1 dokumen	10.344.400	1 dokumen	36.183.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.820.000	1 dokumen	5.302.000	1 dokumen	5.832.200	1 dokumen	4.715.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.466.400	1 dokumen	2.713.000	1 dokumen	2.984.300	1 dokumen	2.340.000

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	5.143.200	12 laporan	5.657.500	12 laporan	6.223.250	12 laporan	5.019.500
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	6.041.900	1 Dokumen	6.646.000	1 Dokumen	7.310.600	1 Dokumen	6.042.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	4.672.562.997	100%	5.139.819.100	100%	5.653.800.950	100%	3.492.259.785
					Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	34 Orang	4.660.637.897	34 Orang	5.126.701.600	34 Orang	5.639.371.700	34 Orang	3.427.123.185
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.241.400	1 Laporan	6.865.500	1 Laporan	7.552.050	1 Laporan	34.222.300
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan keuangan semesteran	2 laporan keuangan semesteran	5.683.700	2 laporan keuangan semesteran	6.252.000	2 laporan keuangan semesteran	6.877.200	2 laporan keuangan semesteran	30.914.300
					Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	36.729.000		40.401.900		44.442.000		30.357.950
					Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	36.729.000	1 Dokumen	40.401.900	1 Dokumen	44.442.000	1 Dokumen	30.357.950
					Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	85.520.000	100%	92.270.000	100%	99.695.000	100%	48.000.000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	33 Buah	34 Buah	18.020.000	34 Buah	18.020.000	34 Buah	18.020.000	34 Buah	

						Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	14 Orang	67.500.000	14 Orang	74.250.000	14 Orang	81.675.000	14 Orang	48.000.000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkatat daerah	100%	100%	1.326.072.800	100%	1.458.679.800	100%	1.619.795.300	100%	1.123.647.464
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.067.300	12 jenis	16.574.000	13 Jenis	18.231.400	13 Jenis	15.471.300
						Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16 Paket	189.839.700	10 Jenis	208.823.600	16 Jenis	229.705.900	7 Jenis	219.629.158
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	36.956.500	29 Jneis	40.652.100	26 Jensi	44.717.300	26 Jensi	35.612.900
						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	2 Paket	2 Paket	129.698.500	51 Jensi	142.668.300	44 Jenis	156.935.100	44 Jenis	116.446.300
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	37.792.200	8 jenis, 55.000 lembar fotocopy	41.571.400	7 jenis, 41.263 lembar fotocopy	60.976.200	8 jenis, 41.263 lembar fotocopy	62.322.456
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	11 Dokumen	11 Dokumen	14.625.600	10 jenis surat kabar	16.088.100	11 jenis surat kabar	17.696.900	11 jenis surat kabar	14.630.350
						Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	16.320.000	24 Kali	17.952.000	24 Kali	19.747.200	24 Kali	24.480.000
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	885.773.000	150 Laporan	974.350.300	150 Laporan	1.071.785.300	150 Laporan	635.055.000
						Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	173.963.270	100%	191.359.500	100%	210.495.450	100%	386.946.488
						Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 4 yang Disediakan	-	2 Unit motor	50.000.000	2 Unit motor	55.000.000	2 Unit motor	60.500.000	2 Unit motor	237.300.000
						Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	123.963.270	5 jenis	136.359.500	7 jenis	149.995.450	4 Jenis	149.646.488
						Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	326.027.035	100%	358.629.700	100%	394.492.600	100%	259.589.000
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	1 Laporan	1 Laporan	14.352.000	2 Jenis	15.787.200	3 Jenis	17.365.900	3 Jenis	9.870.500

					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	178.475.035	3 Rekening	196.322.500	3 Rekening	215.954.700	3 Rekening	142.198.500
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	133.200.000	9 Orang	146.520.000	9 Orang	161.172.000	8 Orang	107.520.000
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%	100%	798.721.041	100%	878.593.000	100%	508.047.540	100%	292.387.741
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	19 Unit	296.609.541	14 Unit	326.270.400	14 Unit	358.897.440	14 Unit	217.293.741
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	394.701.500	1 Gedung kantor	434.171.600	1 Gedung kantor	19.184.000	1 Gedung kantor	19.184.000
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	30.950.000	3 Jenis	34.045.000	4 Jenis	37.449.500	4 Jenis	30.950.000
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	76.460.000	3 Jenis	84.106.000	2 Jenis	92.516.600	2 Jenis	24.960.000
									28.143.247.389		30.955.765.900		33.606.381.490		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks SPBE	2,91	3,00	3,1	3,2	3,2
2.	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	100%	100 %	100 %	100 %	100%

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan

pencapaian Kinerja Dinas. Prestasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim 3 (Tiga) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim yang termuat dalam dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk tiga tahun kedepan 2024–2026 dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muara Enim

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Indeks SPBE	2,91	3,00	3,1	3,2	3,2
2	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	100%	100 %	100 %	100 %	100%

7.2 Indikator Kinerja Kunci

Adapun indikator kinerja kunci pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim adalah:

1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan integrasi
3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten
4. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
5. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
6. Tingkat keamanan informasi pemerintah

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan langkah awal peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam tahun 2024-2026. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait (*stakeholders*) terutama keikutsertaan masyarakat secara aktif didalamnya.

Renstra-SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Coorporate Social Responsibility (CSR)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renstra-SKPD nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan "*political will*" dan "*practical will*" Bupati Muara Enim yang menempatkan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu subsektor strategis dalam pembangunan Kabupaten Muara Enim, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan diperlukan dukungan dan peran aktif dari semua pihak untuk mewujudkan *e-Government* guna menuju *Good Governance* dalam upaya terciptanya Kabupaten Muara Enim yang Agamis, Berdaya saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera. Pada dasarnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim ini disusun untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan Komunikasi dan



Informatika di Kabupaten Muara Enim sehingga hasil pembangunan dimaksud lebih berdaya dan berhasil guna karena tersedia acuan yang jelas. Namun mengingat demikian dinamisnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kehidupan bernegara, maka untuk mengantisipasi dan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan tersebut di masa yang akan datang, maka rencana strategis ini akan dievaluasi setiap lima tahun.

Muara Enim,

2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM



ARDIAN ARIFANARDI, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740720 199311 1 001